



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo)

Community Participation in Village Development (Study in Huntulohulawa Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency)

Sri Yulianti Mozin¹, Siti Nurcahyati Abdussamad², Ainun Marsyida Komendangi³
^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: yulmozin@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat,
Pembangunan Desa,
(Studi Di Desa
Huntulohulawa
Kecamatan Bongomeme
Kabupaten Gorontalo)

Keywords:

*Community Participation,
Village Development,
(Study in Huntulohulawa
Village, Bongomeme
District, Gorontalo
Regency)*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.9549](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9549)

ABSTRAK

Pembangunan desa yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Huntulohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih tergolong terbatas dan cenderung bersifat konsultatif, sementara pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat relatif tinggi melalui kegiatan gotong royong dan keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik. Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat masih bersifat informal dan belum terorganisasi secara sistematis. Faktor pendorong partisipasi meliputi kuatnya budaya gotong royong, kepemimpinan desa yang terbuka, serta adanya program pemberdayaan dan digitalisasi desa. Adapun faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembangunan desa, keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, serta optimalisasi peran seluruh kelompok sosial guna mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Sustainable village development is largely determined by the level of community participation in each stage of development. This study aims to analyze the form, level, and driving and inhibiting factors of community participation in the development of Huntulohulawa Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies involving village officials, community leaders, and villagers. The results show that community participation in the planning stage is still relatively limited and tends to be consultative, while in the implementation stage community

participation is relatively high through mutual cooperation activities and direct involvement in physical development. In the monitoring stage, community participation is still informal and not systematically organized. Factors driving participation include a strong culture of mutual cooperation, open village leadership, and the existence of village empowerment and digitalization programs. Inhibiting factors include the community's low understanding of village development mechanisms, time constraints due to economic activities, limited access to information, and low involvement of women in decision-making forums. This study concludes that increasing community participation in an inclusive and sustainable manner is essential through strengthening community capacity, providing information transparency, and optimizing the role of all social groups to realize effective and equitable village development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa adalah elemen penting dalam usaha nasional untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mempercepat kesejahteraan di tingkat lokal. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, terutama karena variasi lokasi geografis dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang unik. Keberhasilan dalam pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat desa dapat secara aktif terlibat dalam proses pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa telah menjadi suatu tuntutan yang mendesak agar proses pembangunan berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kebutuhan serta potensi yang ada di daerah dapat ditemukan dan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil dari pembangunan menjadi lebih daripada sekadar aspek administratif, namun benar-benar memiliki arti dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam hal ini, nilai-nilai partisipasi seperti diskusi, kesepakatan, dan kerja sama menjadi sumber daya sosial yang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Desa Huntulohulawa yang terletak di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, merupakan tempat yang sempurna untuk meneliti dinamika partisipasi warga dalam pembangunan desa. Desa ini menghadapi berbagai masalah seperti perbedaan ekonomi, kurangnya akses terhadap sumber daya serta informasi, dan perubahan sosial yang berdampak pada tradisi kerja sama dan partisipasi bersama. Masalah-masalah ini berpengaruh pada minimnya tingkat keterlibatan warga dalam proses pembangunan, baik dari segi ide, sumbangan finansial, maupun tenaga kerja.

Berdasarkan Hukum Nomor 6 Tahun 2014 yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan warga di daerahnya. Ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberi kesempatan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan secara partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia, komunikasi, serta sikap petugas desa kadang-kadang menghalangi partisipasi masyarakat. Banyak penduduk yang cenderung tidak aktif dan sepenuhnya mengandalkan program dan dana dari pemerintah tanpa turut serta secara langsung.

Selain itu, faktor-faktor dalam masyarakat seperti pandangan tentang peran dan tanggung jawab dalam pembangunan, kesibukan dalam perekonomian, dan pengurangan budaya kerja sama juga mempengaruhi tingkat partisipasi. Sebenarnya, pembangunan yang bergantung pada partisipasi masyarakat yang aktif akan memberikan efek jangka panjang yang lebih berkelanjutan karena masyarakat merasakan kepemilikan dan tanggung jawab atas hasil dari pembangunan tersebut.

Melalui penelitian di Desa Huntulohulawa, tulisan ini bertujuan untuk mempelajari bentuk dan tingkat keterlibatan warga dalam pembangunan desa, mengenali tantangan yang dihadapi, serta merumuskan cara untuk meningkatkan partisipasi warga. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat

memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas pembangunan desa yang melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Gorontalo maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama.

KAJIAN TEORI

Partisipasi Masyarakat

Definisi Partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat merujuk pada partisipasi aktif individu dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta penilaian suatu program atau kebijakan publik. Berdasarkan pendapat Cohen & Uphoff (1977), partisipasi mencakup keterlibatan dalam berbagai tahap pembangunan, dari perencanaan sampai penerimaan manfaat. Keterlibatan dianggap sebagai aspek penting dalam pembangunan yang berfokus pada masyarakat karena memungkinkan adanya keselarasan antara kebutuhan warga dengan program yang dibuat.

Rondinelli (1981) menyebutkan bahwa partisipasi adalah suatu proses di mana masyarakat dapat memengaruhi atau mengambil alih keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi bukan hanya sekedar "hadir", tetapi mencakup sumbangan dari ide, tenaga, kemampuan, dan pengawasan sosial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi ditentukan oleh seberapa besar masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi hasil keputusan, bukan hanya terlibat secara simbolis.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Beberapa ahli membagi partisipasi ke dalam beberapa bentuk berikut:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Komunitas berperan dalam menetapkan kebutuhan, prioritas program, dan solusi. Hal ini umumnya dilakukan lewat rapat, pertemuan publik, survei kebutuhan, atau diskusi. Bentuk keterlibatan ini sangat penting agar program yang dibuat sesuai dengan keadaan dan harapan masyarakat.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Penduduk juga memberikan usaha, waktu, uang, atau keahlian untuk membantu kegiatan. Di fase ini tampak sumbangan langsung dari masyarakat dalam melaksanakan program, contohnya melalui kerja bakti atau kolaborasi teknis lainnya.

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Masyarakat berperan sebagai pengguna langsung dari hasil suatu program, yang juga turut mendukung kelangsungan hasil pembangunan. Penggunaan yang maksimal menggambarkan adanya rasa memiliki dari masyarakat kepada program tersebut.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Komunitas berfungsi sebagai konsumen langsung dari hasil sebuah program, yang juga berkontribusi pada keberlangsungan hasil pembangunan. Penggunaan yang optimal mencerminkan adanya ikatan kepemilikan dari komunitas terhadap program itu.

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Arnstein (1969) mengembangkan konsep "Ladder of Citizen Participation" yang menggambarkan delapan tangga partisipasi:

1. Manipulation
2. Therapy
3. Informing
4. Consultation
5. Placation
6. Partnership
7. Delegated Power
8. Citizen Control

Model ini menekankan bahwa keikutsertaan tidak hanya tentang keberadaan warga dalam suatu aktivitas, tetapi juga mengenai sejauh mana kekuasaan yang ada pada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di level rendah, partisipasi bersifat semu (tokenisme), di mana warga hanya mendapatkan informasi tanpa memiliki pengaruh. Sementara itu, di tingkat yang lebih tinggi, seperti kemitraan, kekuasaan yang didelegasikan, dan kontrol oleh warga, masyarakat memiliki kekuatan yang nyata untuk menetapkan arah kebijakan serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

Pembangunan Desa

Keterlibatan masyarakat di Desa Huntulohulawa, Gorontalo, mencerminkan implementasi nyata dari model pembangunan bottom-up yang menjadikan warga sebagai aktor kunci dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan setempat. Dalam hal ini, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan individu-individu berpengaruh lainnya berfungsi sebagai penghubung yang menciptakan ruang untuk diskusi publik. Pertemuan-pertemuan musyawarah desa mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang mereka anggap paling mendesak, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sektor agribisnis, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan. Metode ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki warga terhadap proses pembangunan, tetapi juga membangun cara penyelesaian konflik sosial-politik lokal yang lebih damai, karena setiap kelompok dapat menyampaikan harapan dan bernegosiasi secara terbuka.

Dinamika ini selaras dengan konsep New Regionalism yang diperkenalkan oleh Philip Cooke dan para ahli bidang regional pada tahun 1990-an. Konsep ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah dan desa sebagai entitas otonom yang dapat mengelola potensi lokal secara mandiri, mencakup sektor pariwisata, industri kreatif, dan pertanian. Melalui dorongan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan di tingkat lokal, New Regionalism berpendapat bahwa desa dapat berfungsi sebagai pusat inovasi yang membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam konteks Huntulohulawa, teori ini memberikan dasar konseptual untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal serta penyempurnaan agribisnis sebagai cara untuk memperkuat ekonomi desa tanpa bergantung terlalu banyak pada pusat.

Meskipun demikian, penerapan model bottom-up di desa tersebut masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan, seperti petani kecil, buruh tani, ibu rumah tangga, dan pemuda yang belum memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi tertentu, proses musyawarah sering kali didominasi oleh elite desa, termasuk tokoh adat dan kelompok ekonomi yang kuat, sehingga keinginan kelompok rentan kurang terwakili dengan baik. Dominasi para elite ini berpotensi melanggengkan pola pembangunan yang tidak inklusif dan dapat menyebabkan ketegangan sosial jika kebutuhan masyarakat kecil terus dikesampingkan.

Untuk menangani masalah itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Pendidikan yang bersifat lokal menjadi salah satu faktor kunci, khususnya lewat penyediaan program literasi yang berkaitan dengan sosial-politik untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak mereka untuk berpartisipasi. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan inklusif yang melibatkan wanita dan anak muda, guna memperluas jumlah pelaku pembangunan, mengurangi ketimpangan akses informasi, dan mendorong munculnya kepemimpinan baru yang lebih representatif. Penggunaan teknologi melalui pemantauan digital, seperti aplikasi untuk melaporkan perkembangan desa, sistem informasi yang transparan mengenai anggaran, dan platform konsultasi publik secara daring, juga bisa meningkatkan akuntabilitas serta memastikan perencanaan desa berlangsung secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

Dengan menggunakan metode yang menyatukan peningkatan kapasitas komunitas, penguatan struktur desa, serta pemanfaatan teknologi, Huntulohulawa memiliki kesempatan untuk mencapai kemandirian jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari kemungkinan peningkatan pendapatan desa,

pengelolaan konflik yang lebih baik, dan berkembangnya ekosistem sosial yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama antara warga, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait di tingkat regional adalah dasar yang penting untuk menciptakan pembangunan desa yang dapat beradaptasi, responsif, dan berfokus pada kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki serta memahami lebih dalam mengenai pandangan, sikap, dan pengalaman masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Pendekatan ini juga relevan untuk menjelaskan dinamika sosial dan proses yang sulit diukur dengan data kuantitatif, sehingga hasil penelitian dapat menyuguhkan gambaran menyeluruh mengenai situasi di Desa Huntulohulawa.

Fokus penelitian

Fokus utama dari studi ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Desa Huntulohulawa. Penelitian ini menyoroti berbagai jenis keterlibatan, termasuk sumbangan ide, sumber daya, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Di samping itu, penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi partisipasi, serta efek langsung dan tidak langsung dari partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Lokasi penelitian

Tempat penelitian berada di Desa Huntulohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Desa ini dipilih karena memiliki ciri khas yaitu struktur sosial dan budaya yang kuat, serta tantangan tertentu dalam melibatkan warga secara aktif dalam pembangunan. Dengan kondisi geografis dan sosial yang mencerminkan desa-desa di area tersebut, Desa Huntulohulawa menjadi lokasi yang tepat untuk mempelajari bagaimana keterlibatan masyarakat berlangsung dalam konteks pembangunan desa di Gorontalo.

Sumber data

Data dalam penelitian berasal dari dua sumber dasar, yaitu data yang primer dan data yang sekunder. Data primer diambil langsung dari warga desa, pejabat desa, dan pemimpin masyarakat melalui wawancara serta pengamatan di lapangan. Para informan dipilih sesuai dengan peran serta keterlibatan mereka dalam pembangunan desa guna memperoleh informasi yang relevan serta berbagai sudut pandang. Data sekunder mencakup dokumen resmi dari desa, laporan terkait pembangunan, peraturan, serta literatur yang menjadi acuan bantuan dalam memahami konteks serta kebijakan pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian berasal dari dua sumber dasar, yaitu data yang primer dan data yang sekunder. Data primer diambil langsung dari warga desa, pejabat desa, dan pemimpin masyarakat melalui wawancara serta pengamatan di lapangan. Para informan dipilih sesuai dengan peran serta keterlibatan mereka dalam pembangunan desa guna memperoleh informasi yang relevan serta berbagai sudut pandang. Data sekunder mencakup dokumen resmi dari desa, laporan terkait pembangunan, peraturan, serta literatur yang menjadi acuan bantuan dalam memahami konteks serta kebijakan pembangunan desa.

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui serangkaian langkah terstruktur, dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan secara mendetail dan sistematis untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh lengkap dan akurat. Setelah itu, data dikurangi dengan cara memilih dan memusatkan perhatian hanya pada informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Kemudian, data dipresentasikan dalam bentuk narasi deskriptif tematik yang menjelaskan kondisi nyata partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Tahap terakhir mencakup penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menghubungkan berbagai sumber data, melakukan analisis kritis, serta memeriksa konsistensi dan keabsahan temuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Pembangunan

Keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan di Desa Huntulohulawa menunjukkan adanya partisipasi penduduk dalam Musyawarah Desa (Musdes), meskipun frekuensi dan kualitas partisipasi tersebut belum seimbang di semua kelompok masyarakat. Musdes seharusnya menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan harapan pembangunan, tetapi praktik yang ada menunjukkan bahwa forum ini masih lebih banyak diisi oleh tokoh masyarakat, pemangku adat, dan aparat desa. Di sisi lain, masyarakat biasa, terutama wanita, pemuda, dan kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah biasanya hadir sebagai peserta yang pasif dan kurang berani untuk mengajukan ide secara langsung. Ketidakseimbangan partisipasi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mencakup semua lapisan masyarakat.

Keadaan ini tidak lepas dari kurangnya akses terhadap informasi pembangunan yang tepat sebelum revitalisasi data desa dilakukan. Jurnal Abdimas Gorontalo mencatat bahwa profil desa, peta area, dan data jumlah penduduk sebelumnya tidak utuh, tidak terintegrasi, dan umumnya tidak diperbarui secara reguler. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memahami kondisi nyata di desa serta dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan cara yang objektif. Ketidakseimbangan informasi antara pihak desa dan masyarakat luas ini menjadikan warga merasa kurang percaya diri untuk mengemukakan ide-ide mereka dan lebih cenderung menyerahkan keputusan perencanaan kepada para pemimpin lokal. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyusunan RKPDes dan RPJMDes juga memperlemah posisi mereka dalam proses perencanaan.

Jika ditinjau berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Huntulohulawa dalam fase perencanaan terklasifikasi pada kategori konsultasi. Di sini, warga terlibat untuk memberikan masukan, tetapi belum memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Forum musyawarah lebih berfungsi sebagai konsultasi daripada sebagai mitra sejajar, karena keputusan penting tetap berada di tangan perangkat desa. Situasi ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan masih memerlukan penguatan, yang dapat dicapai melalui peningkatan akses terhadap informasi, transparansi dalam proses perencanaan, serta pendidikan publik mengenai pengelolaan pembangunan desa, agar keterlibatan warga dapat bertransformasi dari sekadar konsultasi menjadi kemitraan yang lebih setara.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pada fase pelaksanaan, partisipasi dari masyarakat di Desa Huntulohulawa terlihat sangat tinggi dan lebih merata jika dibandingkan dengan fase perencanaan. Keterlibatan warga sangat jelas terlihat melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, pembangunan jalan desa, perbaikan saluran air, pembersihan lingkungan, serta kegiatan fisik lainnya yang membutuhkan kerja sama. Masyarakat menunjukkan semangat yang tinggi, terutama dalam kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi seluruh penduduk. Temuan ini sejalan dengan data dari Jurnal Abdimas Gorontalo yang

menyatakan bahwa program revitalisasi data dan penguatan sistem informasi desa menghasilkan pola kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Elemen-elemen lokal seperti PKK, karang taruna, kepala dusun, dan lembaga desa lainnya berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga terbentuk sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan warga.

Aktivitas pembangunan yang menerapkan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) juga menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang terlibat secara langsung. Melalui metode PRA, masyarakat berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, survei rumah tangga, pemetaan wilayah, pelatihan komputer, serta diskusi-diskusi desa yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi pembangunan. Partisipasi aktif ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami teknologi, data, dan pengelolaan pembangunan desa. Dengan demikian, pelaksanaan PRA berhasil memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang mereka kerjakan bersama.

Peran wanita dalam fase pelaksanaan juga dicatat cukup berarti, walaupun tidak seaktif partisipasi pria dalam pekerjaan yang bersifat fisik. Wanita berkontribusi melalui aktivitas sosial dan kelembagaan seperti PKK, posyandu, pelatihan administrasi, dan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Peranan mereka sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan aktivitas pembangunan yang tidak bersifat fisik, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan bagi anak, dan pemberdayaan keluarga. Namun, partisipasi wanita dalam proyek fisik masih tergolong terbatas akibat adanya pemisahan peran tradisional dalam masyarakat. Meskipun demikian, tingkat keikutsertaan wanita dalam pekerjaan non-fisik menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki sumbangan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengawasan Pembangunan

Pada tahap pengawasan, masyarakat Desa Huntulohulawa biasanya berpartisipasi dalam bentuk pengawasan yang tidak resmi. Penduduk ikut serta mengamati berlangsungnya pembangunan melalui aktivitas sehari-hari, seperti mengawasi proses pembangunan jalan atau menjaga kebersihan lingkungan, serta menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung kepada aparat desa. Namun, jenis pengawasan yang demikian masih bersifat tidak terorganisir dan belum dicatat dalam sistem formal seperti laporan tertulis atau forum evaluasi resmi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang peduli terhadap pembangunan, tetapi mereka belum memiliki kemampuan atau kebiasaan untuk melakukan pengawasan yang lebih terstruktur dan tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Abdimas Gorontalo, salah satu alasan lemahnya pengawasan masyarakat adalah kurangnya dokumen informasi yang lengkap dan terintegrasi di tingkat desa. Profil desanya, data penduduk, peta wilayah, serta monografi belum tersedia dalam satu sistem terpadu, bahkan beberapa informasi yang ada tidak terbaru dan hanya tersimpan dalam catatan manual. Kekurangan serta ketidakteraturan data tersebut menghalangi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk dapat melakukan pengawasan. Ketika akses terhadap informasi terkait rencana program, pelaksanaan anggaran, dan perkembangan desa sulit dilakukan, maka kemampuan masyarakat untuk mengawasi proses pembangunan menjadi terbatas. Oleh karena itu, kurangnya informasi menjadi salah satu penyebab utama yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Setelah data desa direvitalisasi dan website desa “Tipende” diluncurkan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Website desa yang menyediakan informasi mengenai penduduk, peta tematik, profil desa, laporan kegiatan, dan agenda pemerintahan memberikan akses informasi publik yang lebih luas dan cepat. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ketersediaan informasi secara digital juga membentuk budaya akuntabilitas baru, di mana masyarakat memiliki

landasan yang cukup untuk menilai, mengevaluasi, dan memberikan masukan mengenai pembangunan yang berlangsung. Dengan cara ini, pengawasan berbasis informasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan transparan.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi komunitas di Desa Huntulohulawa dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang mendorong keikutsertaan warga dalam berbagai langkah pembangunan desa. Faktor pertama adalah tradisi gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini telah ada sejak lama dan menjadi dasar sosial yang efektif untuk menggerakkan warga dalam aktivitas fisik seperti perbaikan jalan desa, pembangunan sarana umum, dan membersihkan lingkungan. Nilai gotong royong tidak hanya membuat proses pembangunan lebih efektif, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara warga sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa.

Faktor kedua yang mendorong keterlibatan masyarakat adalah kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan inklusif. Kepala desa secara aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, seperti safari Jumat, musyawarah desa, serta diskusi santai dengan penduduk. Gaya kepemimpinan yang mudah diakses ini menumbuhkan rasa kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga warga merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan. Komunikasi yang sering juga membangun rasa percaya bahwa harapan masyarakat akan didengar dan diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program.

Faktor penggerak selanjutnya adalah adanya program yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi, seperti dukungan KKN PPM yang melibatkan masyarakat dalam pelatihan komputer, pemetaan wilayah, pengumpulan data kependudukan, serta pengelolaan website desa. Program-program ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis warga dan aparat desa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan. Aktivitas yang berlandaskan partisipasi seperti ini membantu masyarakat untuk lebih memahami proses pembangunan secara keseluruhan, sehingga mendorong mereka untuk berperan aktif, bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai mitra dalam upaya pembangunan desa.

Selain itu, partisipasi warga semakin meningkat saat pembangunan yang dilakukan terkait langsung dengan kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan di lingkungan, pembangunan saluran air, pengelolaan kebersihan, dan peningkatan pelayanan administrasi desa. Ketika warga merasakan secara langsung bahwa hasil pembangunan berpengaruh pada kenyamanan dan kualitas hidup mereka, dorongan untuk ikut serta menjadi lebih kuat. Dengan begitu, relevansi program pembangunan terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Beberapa tantangan ada dalam keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Huntulohulawa. Tantangan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja pembangunan desa, termasuk proses penyusunan RKPDes, RPJMDes, serta tahap penganggaran Dana Desa. Kurangnya sosialisasi berdampak pada sebagian besar warga yang tidak tahu bagaimana aspirasi dapat disampaikan dan berpengaruh pada keputusan pembangunan. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung pasif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan warga masih harus ditingkatkan, karena tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan kesulitan untuk ikut serta secara aktif dan berarti.

Halangan kedua terkait dengan keterbatasan waktu masyarakat, terutama karena mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Kegiatan bertani sering kali memerlukan perhatian yang besar pada waktu-waktu tertentu, seperti saat menanam atau memanen, sehingga warga memiliki sedikit

kesempatan untuk hadir dalam rapat desa. Keadaan ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam Musyawarah Desa dan forum resmi lainnya, yang seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan. Aspek pekerjaan ini menjadi hambatan yang bersifat struktural, yang membutuhkan penyesuaian waktu dari pemerintah desa agar partisipasi warga dapat lebih maksimal.

Selanjutnya, terdapat hambatan ketiga yang berkaitan dengan akses terhadap informasi yang sebelumnya kurang memadai, terutama sebelum revitalisasi data dan penggunaan sistem informasi berbasis web. Banyak dokumen terkait pembangunan, profil desa, serta data kependudukan tidak dikelola dengan baik dan tidak diperbarui secara rutin. Informasi mengenai program, anggaran, dan rencana pembangunan tidak dibagikan secara merata di semua lapisan masyarakat, sehingga mengurangi kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi pembangunan. Situasi ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengawasan sosial secara keseluruhan.

Rintangan terakhir yang dihadapi adalah partisipasi perempuan yang masih terhalang oleh tanggung jawab rumah tangga dan norma-norma sosial yang ada. Meskipun perempuan terlibat dalam kegiatan PKK, posyandu, dan berbagai aktivitas sosial lainnya, kehadiran mereka dalam forum formal seperti Musdes masih cukup rendah. Banyak perempuan yang tidak punya banyak waktu bebas karena kewajiban rumah tangga mereka, sehingga peran mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan menjadi tidak menonjol. Selain itu, budaya setempat yang cenderung menempatkan perempuan di ranah rumah tangga juga mempengaruhi seberapa besar mereka terlibat dalam diskusi tentang pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu ada strategi pemberdayaan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara berarti dalam pembangunan desa.

Efektivitas Partisipasi Masyarakat terhadap Hasil Pembangunan

Hasil dari proyek yang dilakukan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat di Desa Huntulohulawa menunjukkan efektivitas yang cukup memuaskan dalam berbagai hal. Salah satu hasil yang paling mencolok adalah efisiensi dalam pembangunan fisik. Aktivitas seperti pembuatan jalan desa, perbaikan saluran air, dan penataan kawasan dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah karena memanfaatkan tenaga kerja sekitar. Partisipasi warga secara sukarela atau lewat sistem gotong royong membantu mengurangi biaya operasional, serta mempercepat proses pekerjaan. Efisiensi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat aspek sosial, tetapi juga memberikan keuntungan nyata dalam pengelolaan anggaran untuk pembangunan desa.

Selain itu, inovasi digital melalui situs web desa dan sistem data berbasis internet telah mengakibatkan perubahan besar dalam pengelolaan informasi dan transparansi pemerintahan desa. Dengan adanya platform digital ini, masyarakat bisa menjangkau berbagai informasi seperti data demografi, profil desa, peta tematik, serta jadwal kegiatan pemerintah dengan lebih cepat dan lebih luas. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga membantu kolaborasi antara perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Tersedianya informasi secara online menjadi bukti bahwa digitalisasi bisa meningkatkan akuntabilitas dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau pembangunan.

Dokumen-dokumen penting seperti citra desa, laporan monografi, peta tematik, serta "Desa dalam Angka" yang telah disusun dengan lebih komprehensif dan terpadu, juga menjadi dasar yang krusial dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan. Adanya dokumen-dokumen ini memungkinkan perencanaan dilakukan dengan lebih tepat dan berdasarkan data yang akurat. Dengan informasi yang jelas mengenai kondisi demografi, potensi wilayah, dan tuntutan masyarakat, pemerintah desa dapat merancang program yang lebih terfokus dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perencanaan. Di samping itu, program pelatihan komputer, pemetaan, dan pengelolaan situs web yang melibatkan pemuda dan pejabat desa juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Peningkatan kapabilitas ini tidak hanya berperan dalam kelancaran pembangunan saat ini, tetapi juga

menjadi investasi untuk keberlanjutan pengelolaan desa di masa depan.

Walaupun telah ada banyak hasil positif, beberapa program pembangunan non-fisik seperti pelatihan kewirausahaan serta pengembangan ekonomi produktif masih belum memberikan hasil yang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam program-program ini cenderung rendah, dan dampak ekonominya belum terasa secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik sangat baik, masih ada kebutuhan untuk upaya yang lebih kuat di sektor pemberdayaan ekonomi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya strategi berkelanjutan, seperti pendampingan yang terus-menerus, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta peningkatan akses masyarakat kepada kesempatan bisnis untuk mencapai dampak sosial ekonomi yang lebih besar bagi desa.

Dampak Partisipasi Terhadap Pembangunan Desa

Keterlibatan komunitas memberikan berbagai efek positif terhadap proses pembangunan di Desa Huntulohulawa, baik dari sisi sosial, pemerintahan, maupun peningkatan kemampuan masyarakat. Salah satu efek yang paling penting adalah bertambahnya rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Saat komunitas berpartisipasi langsung dalam kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, pemetaan area, atau pengumpulan data profil desa, mereka merasa bahwa hasil pembangunan itu adalah kontribusi mereka sendiri. Rasa kepemilikan ini kemudian berdampak baik pada keberlangsungan pembangunan, karena penduduk akan lebih peduli dalam merawat, memperbaiki, dan menjaga fasilitas yang telah dibangun bersama.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga memperkuat hubungan sosial dan interaksi antarwarga. Aktivitas gotong royong, pertemuan, dan kolaborasi dalam program pembangunan membentuk interaksi sosial yang dekat, sehingga memperkuat rasa solidaritas dan memperdalam ikatan sosial baik antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Proses pertemuan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemimpin masyarakat, kaum muda, wanita, dan perangkat desa juga mengarah pada terbentuknya pola komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan hasil fisik, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung harmoni dan keberlangsungan pembangunan desa.

Dalam konteks pelayanan publik, partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Implementasi sistem informasi desa berbasis website yang dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi, dan mempermudah warga mendapatkan layanan administrasi. Keterbukaan data melalui platform digital ini menciptakan suasana pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai secara langsung proses pembangunan. Selain itu, pelatihan teknologi seperti komputer, Sistem Informasi Geografis (SIG), serta pengelolaan website desa memberikan dampak besar terhadap peningkatan kapasitas teknologi bagi aparatur dan pemuda. Peningkatan keterampilan digital ini menjadi aset penting bagi desa dalam menghadapi tuntutan administrasi modern dan memperkuat kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat tidak hanya memperlancar pembangunan, tetapi juga memicu transformasi sosial dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk Desa Huntulohulawa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Huntulohulawa berlangsung pada berbagai tahapan, namun tingkat dan kualitas keterlibatannya belum merata. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan cenderung bersifat konsultatif, di mana masyarakat hadir dalam musyawarah desa tetapi belum memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dipengaruhi oleh

keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan desa, serta dominasi elite desa dalam forum perencanaan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat yang lebih tinggi, terutama melalui kegiatan gotong royong dan keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik desa. Masyarakat berperan aktif sebagai pelaksana kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Partisipasi perempuan dan pemuda sudah terlihat, namun masih terbatas pada kegiatan non-fisik dan belum optimal dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan pembangunan masih bersifat informal dan belum terorganisasi secara sistematis. Pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pengamatan langsung dan penyampaian keluhan secara lisan kepada aparat desa. Namun demikian, penerapan digitalisasi desa melalui revitalisasi data dan pemanfaatan website desa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan.

REFERENSI

- 2014, uud N. 6 T. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
m.fachri adnan. (2013). Reformasipemerintahandaerah. *Ilmu Sosial Politik*, XII(no.2).
Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
Nugraha, J. T., Orbawati, E. B., Fadlurrahman, F., Mukti, A., & Ikhtiara, S. (2024). Public Service Quality dan Customer Satisfaction: Mengeksplorasi Atribut Kualitas Pelayanan Pada Sektor Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 167–174. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3653>
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality. *Journal of Marketing*, 41–50.
Ratminto, & Winarsih. (2013). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama.
Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. (1990). *Delivering Quality Service*. Free Press.